PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA SUBJEK SENGKETA ANTROPOLOGI HUKUM

Nama Mahasiswa : Luki Soni
Email: jihanseptiani3434@gmail.com
No BP: 2110003600245
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi hukum merupakan salah satu ilmu yang merupakan gabungan dari antropologi dan ilmu hukum. Antropologi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Antrophos* yang artinya manusia dan *Logos* yang artinya ilmu. Lingkup dari antropologi hukum itu sendiri adalah peran, status atau kedudukan, nilai, norma, dan kebudayaan. Pada dasarnya antropologi hukum mempelajari tentang hubungan hukum manusia dengan manusia.

Membahas antropologi hukum tidak dapat terlepas dari nilai budaya dalam suatu daerah terhadap manusia. Di setiap daerah memiliki nilai budayanya masing-masing sehingga lingkup Antropologi Hukum adalah manusia dan budaya hukum. Kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum. Objek kajian dari antropologi hukum itu sendiri adalah perilaku manusia yang mana subjeknya adalah manusia dalam masyarakat sederhana dan mempelajari bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Antropologi Hukum menitikberatkan pada budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum.

Seiring perkembangan jaman dari jaman pra-sejarah hingga jaman modern ini perilaku manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat di mana nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat berkembang dengan adanya kolonialisme dan pengaruh asimilasi sehingga terdapat banyaknya penyesuaian dan perubahan nilai dan perilaku dalam masyarakat. Antropologi

Hukum memiliki peran yang cukup penting dalam mengkaji perilaku masyarakat dalam lingkup penegakan hukum dan efektifitas dari implementasi hukum itu sendiri.

Subjek antropologi hukum merupakan perilaku manusia di masyarakat sederhana maupun modern sehingga dalam penyelesaian sengketa hukum, antropologi hukum memiliki peran yang cukup penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan kajian perilaku dimana penerapan hukum akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan nilai dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat bersifat dinamis sehingga dalam penerapan hukum pun harus mengikuti perkembangan dari masyarakat tersebut. Konflik hukum juga selalu ada dan terus berkembang berbagai macam konflik baru akibat perkembangan dan perubahan perilaku manusia di jaman modern ini sehingga antropologi hukum dipandang sangat penting sebagai ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia.

Akibat dari perkembangan konflik dan perubahan perilaku dalam menangani konflik dari jaman dahulu hingga sekarang dengan adanya berbagai Lembaga dalam penyelesaian sengketa dan regulasi baru dalam rangka menghadapi dan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa. Terlebih lagi adanya peranan budaya yang melekat dalam suatu masyarakat membuat perilaku dalam hal penanganan sengketa akan berbeda. Maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana dinamika dan perkembangan subjek sengketa antropologi hukum

B. PEMBAHASAN

Dalam perspektif Antropologi Hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorisasi menjadi tiga macam, yaitu Konflik kepentingan (*conflict of interests*), Konflik nilai-nilai (*conflict of values*), Konflik norma (*conflict of norms*).

Antropologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang berlaku dalam proses pengendalian sosial. Hukum merupakan sebuah aturan yang hanya berisi larangan dan perintah yang harus dipatuhi dan sanksi atas pelanggaran, melainkan terdapat tujuan utama untuk menciptakan ketertiban sosial. Antropologi hukum memiliki pendekatan secara Holistik (menyeluruh), yaitu mengaitkan antara fenomena hukum dengan aspek kebudayaan secara menyeluruh.

Membahas tentang hukum bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga hukum itu sendiri produk kebudayaan. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah skema final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Keberadaan antropologi hukum ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum tidak hanya dilihat pada perundangan normatif saja atau hukum adat, akan tetapi juga ada peran budaya yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam model penyelesaian kasus. Institusi yang dikenal oleh masyarakat sebagai penyelesai sengketa paling tidak ada dua, yaitu institusi tradisional dan Institusi Negara. Jadi dalam kajian antropologi hukum, aspek yang dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa sebenarnya dilihat bagaimana pemahaman masyarakat dalam ketika menghadapi konflik itu sendiri sehingga berbagai model yang ditentukan oleh pihak yang berkonflik.

Masyarakat sangat menyadari bahwa dalam mendapatkan akses keadilan maka hal yang mudah untuk dijalani adalah melalui pengadilan. Meskipun jalur non-litigasi tersedia, namun banyak yang masih merasakan kurang mendapatkan respon yang positif. Meskipun ada juga jalur lain yakni dengan jalan mediasi. Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat nusantara dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai lokal yang penting guna membangun consensus atau dengan musyawarah mufakat dalam penyelesaian persoalan. Para pengambil kebijakan hukum juga melihat aspek-aspek dalam penetapan hukum melalui konsep antropologi hukum. Mengingat pluralisme hukum yang berkembang dimasyarakat bukan untuk menyalahi konsep hukum yang berlaku dimasyarakat, akan tetapi diupayakan dapat mencari jalan tengah proses hukum dengan konsep antropologi hukum.

Jika ditarik Kembali ke awal perkembangan antropologi dimana pada Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an) Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru termasuk suku-suku asing. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa yang kemudian menjadi perhatian bangsa Eropa terhadap

bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi. ·

Fase Kedua dimana bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, Antropologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

Fase Ketiga, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala dengan adanya konflik. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial. ·

Fase Keempat, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Banyak negara pula yang berusaha melepaskan diri dari penjajahan.

Dari fase perkembangan antropologi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk antropologi hukum itu sendiri baru berkembang pesat setelah fase keempat dimana hukum positif tertulis sudah hampir dimiliki seluruh negara dan diakui keberadaannya. Pada masa tersebut penyelesaian

sengketa yang ada masih digunakan dengan sanksi kekerasan dan belum berkembangnya Lembaga peradilan yang bergerak di bawah hukum dalam penyelesaian sengketa. Perilaku masyarakat yang masih dapat terbilang primitive pada saat sebelum masuk ke fase keempat seperti “nyawa dibalas nyawa” masih menjadi salah satu contoh perilaku dalam penyelesaian sengketa.

Masyarakat terus berkembang dimana Hak Asasi Manusia juga pada akhirnya diakui sebagai hukum supranasional. Dibentuknya Lembaga untuk menangani penyelesaian sengketa dan produk hukum juga disesuaikan dengan HAM dan perkembangan hukum tersebut juga merupakan peran antropologi dalam mengkaji masyarakat yang mulai sadar dengan artinya kehidupan dan saling menghargai hak yang dimiliki oleh setiap individu. Perilaku masyarakat terus berkembang seiring perkembangan jaman. Pada saat ini semakin berkembangnya teknologi menyebabkan perubahan perilaku manusia yang pada salah satu contohnya akhirnya terdapat UU ITE. Antropologi hukum sangat penting sebagai landasan dalam pembentukan hukum maupun dalam hal Langkah responsif atas suatu konflik baru yang terjadi.

Adanya Lembaga/institusi sebagai penyelesai sengketa merupakan hasil dari perilaku masyarakat yang tidak puas dan keinginan untuk menang sendiri sehingga adanya pihak ketiga yang berwenang dan diamanati oleh hukum membuat sengketa dapat diselesaikan dan hasil dapat diterima. Lembaga non-litigasi pun masih kurang diminati meskipun menghasilkan *win-win solution*. Masyarakat lebih memilih Lembaga litigasi dalam penyelesaian sengketa karena hasilnya terdapat yang kalah maupun yang menang dan lagi adanya hukum tertulis yang jelas dalam putusan sehingga membuat masyarakat memilih jalur tersebut dibandingkan harus dengan mediasi ataupun cara non-litigasi lainnya.

Bukan hanya perbedaan jaman tetapi juga masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lainnya juga mengalami perbedaan. Terutama masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi hukum adat sehingga penerapan hukum pada satu negara tidak dapat dilaksanakan secara mentah-mentah melainkan menyesuaikan dengan perilaku masyarakat dan nilai yang dijunjung di suatu daerah.

C. PENUTUP

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam budaya hukum. Hukum terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, dimana di sinilah letak peran dari antropologi hukum terutama dalam penerapan hukum juga dalam hal penyelesaian sengketa. Subjek dari antropologi hukum adalah perilaku masyarakat sederhana dimana seiring perkembangan jaman dan perbedaan masyarakat akan menghasilkan cara penerapan hukum yang berbeda pula.

Ada empat fase dalam perkembangan antropologi dimana dimulai dari bangsa Eropa yang mengamati perbedaan budaya pada bangsa lainnya sehingga menjadi cabang ilmu yang digunakan untuk menduduki suatu wilayah dan pembentukan hukum atas suatu wilayah. Dahulu penyelesaian masalah tidak dilaksanakan secara damai melainkan jalur kekerasan sehingga seiring perkembangan jaman sudah terdapat Lembaga yang mengakui hak setiap individu dan pelaksana hukum yang dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menyesuaikan keberadaan budaya dalam masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Adanya Lembaga/institusi sebagai penyelesai sengketa merupakan hasil dari perilaku masyarakat yang tidak puas dan keinginan untuk menang sendiri sehingga adanya pihak ketiga yang berwenang dan diamanati oleh hukum membuat sengketa dapat diselesaikan dan hasil dapat

diterima. Lembaga non-litigasi pun masih kurang diminati meskipun menghasilkan *win-win solution*. Masyarakat lebih memilih Lembaga litigasi dalam penyelesaian sengketa karena hasilnya terdapat yang kalah maupun yang menang dan lagi adanya hukum tertulis yang jelas dalam putusan sehingga membuat masyarakat memilih jalur tersebut dibandingkan harus dengan mediasi ataupun cara non-litigasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..

.